



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR II TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-

- 19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp 1.964.034.612.233,00 bertambah sebesar Rp

123.591.342.435,00 sehingga menjadi sebesar Rp 2.087.625.954.668,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

Semula	Rp 1.902.452.411.838,00
Bertambah	Rp 41.456.695.752,00
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp 1.943.909.107.590,00

b. Belanja Daerah

Semula	Rp 1.956.534.612.233,00
Bertambah	Rp 123.591.342.435,00
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp 2.080.125.954.668,00

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp 61.582.200.395,00
Bertambah	Rp 82.134.646.683,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 143.716.847.078,00

2. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp 7.500.000.000,00
Berkurang	Rp 0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp 7.500.000.000,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp 315.624.540.238,00
2) Bertambah	Rp 19.786.016.352,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	Rp 335.410.556.590,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp 1.586.347.871.600,00
2) Bertambah	Rp 21.670.679.400,00
Jumlah Pendapatan Transfer Setelah Perubahan	Rp 1.608.018.551.000,00

c.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah		
1)	Semula	Rp	480.000.000,00
2)	Bertambah	Rp	-
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah		
	Perubahan	Rp	480.000.000,00

Pasal 4

I.	Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :		
a.	Pajak Daerah		
	Semula	Rp	136.775.000.000,00
	Bertambah	Rp	16.591.894.000,00
	Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp	153.366.894.000,00
b.	Retribusi Daerah		
	Semula	Rp	69.887.676.738,00
	Bertambah	Rp	91.654.865.850,00
	Jumlah Retribusi Daerah Setelah		
	Perubahan	Rp	161.542.542.588,00
c.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		
	Semula	Rp	16.175.527.000,00
	Bertambah	Rp	426.593.002,00
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Di Pisahkan		
	Setelah Perubahan	Rp	16.602.120.002,00
d.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	Semula	Rp	92.786.336.500,00
	Berkurang	Rp	(88.887.336.500,00)
	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
	Setelah Perubahan	Rp	3.899.000.000,00
II.	Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :		
a.	Transfer Pemerintah Pusat		
	Semula	Rp	1.439.103.780.000,00
	Bertambah	Rp	10.945.033.000,00
	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat		
	Setelah Perubahan	Rp	1.450.048.813.000,00

b. Transfer Antar Daerah		
Semula	Rp	147.244.091.600,00
Bertambah	Rp	10.725.646.400,00
Jumlah Transfer Antar Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	157.969.738.000,00

III. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah		
Semula	Rp	480.000.000,00
Bertambah	Rp	-
Jumlah Pendapatan Hibah		
Setelah Perubahan	Rp	480.000.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, bersumber dari:

a. Belanja Operasi		
Semula	Rp	1.764.112.747.942,00
Berkurang	Rp	(246.807.536.429,00)
Jumlah Belanja Operasi Setelah Perubahan	Rp	1.517.305.211.513,00
b. Belanja Modal		
Semula	Rp	144.379.410.215,00
Bertambah	Rp	37.319.523.748,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	181.698.933.963,00
c. Belanja Tidak Terduga		
Semula	Rp	12.500.000.000,00
Berkurang	Rp	(4.330.283.629,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	7.669.716.371,00
d. Belanja Transfer		
Semula	Rp	36.042.454.076,00
Bertambah	Rp	337.409.638.745,00
Jumlah Belanja Transfer Setelah Perubahan	Rp	373.452.092.821,00

Pasal 6

I. Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari :

a. Belanja Pegawai

Semula	Rp 837.068.660.855,00
Bertambah	Rp 74.740.670.232,00
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp 911.809.331.087,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Semula	Rp 825.271.615.534,00
Berkurang	Rp (332.561.482.144,00)
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp 492.710.133.390,00

c. Belanja Hibah

Semula	Rp 90.069.731.553,00
Bertambah	Rp 10.857.490.483,00
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp 100.927.222.036,00

d. Belanja Bantuan Sosial

Semula	Rp 11.702.740.000,00
Bertambah	Rp 155.785.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp 11.858.525.000,00

II. Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dari :

a. Belanja Modal Tanah

Semula	Rp 100.000.000,00
Berkurang	Rp (80.000.000,00)
Jumlah Belanja Modal Tanah Setelah Perubahan	Rp 20.000.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Semula	Rp 25.236.967.498,00
Bertambah	Rp 20.645.093.751,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin Setelah Perubahan	Rp 45.882.061.249,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Semula	Rp 49.195.907.035,00
Bertambah	Rp 9.044.047.647,00
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
Setelah Perubahan	Rp 58.239.954.682,00

Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi

Semula	Rp 69.375.928.453,00
Berkurang	Rp (5.841.500.311,00)
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	
Setelah Perubahan	Rp 63.534.428.142,00

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Semula	Rp 220.607.229,00
Bertambah	Rp 13.146.882.661,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
Setelah Perubahan	Rp 13.367.489.890,00

e. Belanja Modal Aset Lainnya

Semula	Rp 250.000.000,00
Bertambah	Rp 405.000.000,00
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
Setelah Perubahan	Rp 655.000.000,00

III. Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber dari :

a. Belanja Tidak Terduga

Semula	Rp 12.500.000.000,00
Berkurang	Rp (4.330.283.629,00)
Jumlah Belanja Tidak Terduga	
Setelah Perubahan	Rp 7.669.716.371,00

IV. Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bersumber dari :

a. Belanja Bagi Hasil

Semula	Rp 13.959.954.076,00
Bertambah	Rp 693.213.345,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil	
Setelah Perubahan	Rp 14.653.167.421,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

Semula	Rp 22.082.500.000,00
Bertambah	Rp 336.716.425.400,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	
Setelah Perubahan	Rp 358.798.925.400,00

Pasal 7

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, bersumber dari:

a. Penerimaan Pembiayaan

Semula	Rp 61.582.200.395,00
Bertambah	Rp 82.134.646.683,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp 143.716.847.078,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

Semula	Rp 7.500.000.000,00
Bertambah	Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	
Setelah Perubahan	Rp 7.500.000.000,00

Pasal 8

I. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Semula	Rp 61.582.200.395,00
Bertambah	Rp 82.134.646.683,00
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
Setelah Perubahan	Rp 143.716.847.078,00

II. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah

Semula	Rp 7.500.000.000,00
Bertambah	Rp 0
Jumlah Penyertaan Modal Daerah Tahun Sebelumnya	
Setelah Perubahan	Rp 7.500.000.000,00

6. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
10. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
11. Lampiran XI Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
12. Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

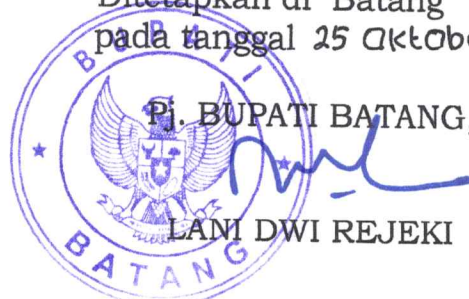
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 25 Oktober 2024



Diundangkan di Batang
pada tanggal 25 Oktober 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 11
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG, PROVINSI JAWA TENGAH:
(11-320/2024)

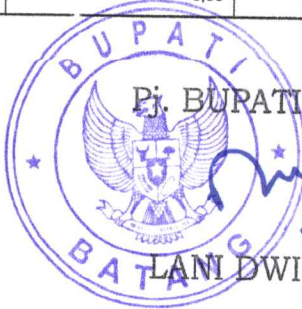


LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR II TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN BATANG
RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	315.624.540.238,00	335.410.556.590,00	19.786.016.352,00
4.1.01	Pajak Daerah	136.775.000.000,00	153.366.894.000,00	16.591.894.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	69.887.676.738,00	161.542.542.588,00	91.654.865.850,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.175.527.000,00	16.602.120.002,00	426.593.002,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	92.786.336.500,00	3.899.000.000,00	-88.887.336.500,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.586.347.871.600,00	1.608.018.551.000,00	21.670.679.400,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.439.103.780.000,00	1.450.048.813.000,00	10.945.033.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	147.244.091.600,00	157.969.738.000,00	10.725.646.400,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	480.000.000,00	480.000.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	1.902.452.411.838,00	1.943.909.107.590,00	41.456.695.752,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.764.112.747.942,00	1.517.305.211.513,00	-246.807.536.429,00
5.1.01	Belanja Pegawai	837.068.660.855,00	911.809.331.087,00	74.740.670.232,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	825.271.615.534,00	492.710.133.390,00	-332.561.482.144,00
5.1.05	Belanja Hibah	90.069.731.553,00	100.927.222.036,00	10.857.490.483,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.702.740.000,00	11.858.525.000,00	155.785.000,00
5.2	BELANJA MODAL	144.379.410.215,00	181.698.933.963,00	37.319.523.748,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	100.000.000,00	20.000.000,00	-80.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.236.967.498,00	45.882.061.249,00	20.645.093.751,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.195.907.035,00	58.239.954.682,00	9.044.047.647,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	69.375.928.453,00	63.534.428.142,00	-5.841.500.311,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	220.607.229,00	13.367.489.890,00	13.146.882.661,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	250.000.000,00	655.000.000,00	405.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	12.000.000.000,00	7.669.716.371,00	-4.330.283.629,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	12.000.000.000,00	7.669.716.371,00	-4.330.283.629,00
5.4	BELANJA TRANSFER	36.042.454.076,00	373.452.092.821,00	337.409.638.745,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.959.954.076,00	14.653.167.421,00	693.213.345,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	22.082.500.000,00	358.798.925.400,00	336.716.425.400,00
	Jumlah Belanja	1.956.534.612.233,00	2.080.125.954.668,00	123.591.342.435,00
	Total Surplus/(Defisit)	-54.082.200.395,00	-136.216.847.078,00	-82.134.646.683,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	61.582.200.395,00	143.716.847.078,00	82.134.646.683,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.582.200.395,00	143.716.847.078,00	82.134.646.683,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	0,00
	Pembiayaan Netto	54.082.200.395,00	136.216.847.078,00	82.134.646.683,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

 **Pj. BUPATI BATANG,**

LANI DWI REJEKI